

- a. Ketidakjelasan (*jahālah*), yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:
- (a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - (b) Ketidakjelasan harga
 - (c) Ketidakjelasan masa (tempo, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyār syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal).
 - (d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kāfil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:
- (a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
 - (b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Oleh karenanya, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga wajar dan melarang mereka menambah dari harga yang wajar, maka hal ini dipandang wajar bahkan hukumnya wajib.

H. Pendapat Ulama' tentang Tas'ir

Apabila kenaikan harga di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (*ikhtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga barang melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan

Selanjutnya, ulama' fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, Beliau menjawab, kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, sebagian besar ulama' Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim alJauziyyah, dan mayoritas pendapat Ulama' Malikiyah. Ulama' Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa: "segala kebijaksanaan penguasa harus

mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Alasan mereka adalah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada salah seorang keluarga Ansar. Pohon kurma Samurah Ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansari. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal di kebun keluarga ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak samurah. Akhirnya seorang Ansar ini mengadukan persoalan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang umbuh miring ke kebun ansar itu kepada Ansar. Tetapi Samurah enggan menjualnya, lalu nabi menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kurma itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang Ansar itu untuk menebang pohon kurma itu.

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, inti dari kasus itu adalah kemudharatan yang diderita orang ansar ini, disebabkan sifat egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, jika pedagang telah melakukan permainan harga sehingga

Janji yang dimaksud disini adalah banyak macamnya, salah satu contoh diantaranya yaitu tentang HET pada penetapan harga Gas Elpiji 3 Kg. Ketika Gas Elpiji 3 Kg dijual Pangkalan/ Sub Penyalur kepada konsumen dengan harga tidak sesuai dengan penetapan HET. Hal ini jelas telah melanggar hak konsumen, konsumen membayar sejumlah uang kepada Pangkalan/ Sub Penyalur untuk mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg, tetapi konsumen justru dicurangi oleh Pangkalan/ Sub Penyalur dengan menaikkan harga di atas HET yang telah ditetapkan. Disinilah letak ketidaksesuaian dengan penetapan HET yang diberikan pada Pangkalan/ Sub Penyalur.

Kebanyakan dari Pangkalan/ Sub Penyalur hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang besar, mereka seringkali tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar, sejalan dengan pidana tersebut, hakim juga dapat menambahkan sanksi tambahan yang lain, sesuai dengan ketentuan pasal 63 UUPK, yaitu:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
Ganti rugi terhadap konsumen dapat diberikan apabila ada kasus yang mengakibatkan konsumen secara individu mengalami kerugian baik secara materiil atau immateriil.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.

